



## **RENJA (RENCANA KERJA) TAHUN 2025**



## **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara ini dapat tersusun.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 ini sebagai penjabaran Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen ini tentu saja masih dinamis karena bersifat sehingga dibutuhkan masukan dan saran demi kesempurnaan dokumen ini.

Harapannya, semoga dokumen Renja Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Aamiin.



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

**REKSI BASYAH, S.STP, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)  
NIP. 19830923 200212 1 003**

## **DAFTAR ISI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>   | <b>3</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 3         |
| 1.2. Landasan Hukum.....  | 4         |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 6         |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 6         |
| <br><b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>                                  | <b>7</b>  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu<br>dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... | 7         |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....   | 14        |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat<br>Daerah .....                           | 16        |
| 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD .....   | 17        |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....  | 21        |
| <br><b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>  | <b>23</b> |
| 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....   | 23        |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....  | 26        |
| 3.3. Program dan Kegiatan.....  | 27        |
| <br><b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                                      | <b>35</b> |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>38</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran Rencana Kerja lima tahunan berupa Rencana Strategis (Renstra). Sehingga Renja Tahun 2025 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja Tahun 2025 merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Tahun 2025 Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Tahun 2024 Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD pada tahun berkenaan;



3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;
4. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan bidang pemerintahan di Tahun 2025 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran dalam melaksanakan kebijakan strategis tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun Renja Tahun 2025. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Renstra 2024-2026. Renja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 51).
12. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Tahun 2025 adalah sebagai panduan dalam penyusunan Renja yang merupakan acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah:

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025;
2. Terwujudnya penjabaran Renstra Tahun 2024-2026 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2025;
4. Melakukan evaluasi terhadap Renja tahun lalu dan tahun berjalan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebagai berikut:

- BAB I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
- BAB II : **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- BAB III : **Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah**, terdiri atas telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Program dan kegiatan;
- BAB IV : **Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah** terdiri program dan kegiatan yang diinginkan, memilih dan menetapkan program yang ingin ditingkatkan kinerjanya
- BAB V : **Penutup**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Lebih lanjut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan tahun 2024 dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (2025) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dalam tabel lampiran pada laporan ini.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara melalui sinkronisasi perencanaan dengan realisasi anggaran dan peningkatan capaian target kinerja serta evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dengan upaya penerapan pelayanan terpadu satu pintu dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Optimalisasi penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional dan sertifikasi/diklat untuk jabatan struktural, fungsional dan pelaksana;
- d. Meningkatkan kualitas data kepegawaian serta integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah dengan pusat;
- e. Upaya peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja melalui implementasi e-absensi dan e-kinerja.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian  
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023  
Kabupaten Padang Lawas Utara

| KODE |    |    |   |    |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Target capaian kinerja RPD Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023 (Tahun lalu/n-2) |                      |                       | Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|----|------|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |    |      |   |  |  |   | Target 2023 (n-2)  | Realisasi 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |    |      | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                    | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 03 |    |   |    |      | Kepegawaian   |  |  |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 |   |    |      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 99 %                                       |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja  | 1 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan                                 |   |  |                      |                       | 10 Laporan   | 10   | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah   |  |   |  |                      |                       |  | 0  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                                 |   |  |                      |                       | 12 Dokumen   | 12   | 100,00%                                      |

| KODE |    |    |   |    |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                            | Target capaian kinerja RPD Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023 (Tahun lalu/n-2) |                      |                       | Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|----|------|--|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |    |      |  |  |  |   | Target 2023 (n-2)  | Realisasi 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |    |      | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                    | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 7 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 40 Paket                                   |   |  |                      |                       | 5 Paket  | 5  | 12,50%                                       |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 35 Paket                                   |   |  |                      |                       | 40 Paket   | 40   | 114,29%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 800 Paket                                  |   |  |                      |                       | 800 Paket  | 800  | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 10 Paket                                   |   |  |                      |                       | 9 Paket  | 9  | 90,00%                                       |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 8 Dokumen                                  |   |  |                      |                       | 19 Dokumen   | 19   | 237,50%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 120 Laporan                                |   |  |                      |                       | 215 Laporan  | 215  | 179,17%                                      |

| KODE |    |    |   |    |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Target capaian kinerja RPD Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023 (Tahun lalu/n-2) |                      |                       | Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|----|------|--|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |    |      |  |  |  |   | Target 2023 (n-2)  | Realisasi 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |    |      | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                    | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 4 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 300 Lembar                                 |   |  |                      |                       | 1000 Laporan   | 1000   | 333,33%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                                 |   |  |                      |                       | 12 Laporan   | 12   | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 16 Laporan                                 |   |  |                      |                       | 16 Laporan   | 16   | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 3 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit                                     |   |  |                      |                       | 11 Unit  | 11   | 183,33%                                      |
| 5    | 03 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 50 Unit                                    |   |  |                      |                       | 88 Unit  | 88   | 176,00%                                      |

| KODE |    |    |   |    |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)  | Target capaian kinerja RPD Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023 (Tahun lalu/n-2) |                      |                       | Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|----|------|---|--|--|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |    |      |   |  |  |   | Target 2023 (n-2)  | Realisasi 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |    |      | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7                    | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 03 | 02 |   |    |      | Program Kepegawaian Daerah                                    | Meningkatnya Pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah  | 95 %                                       |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN        | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  | 6 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                      | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN  | 7 Laporan                                  |   |  |                      |                       | 7 Laporan  | 7  | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 24 Dokumen                                 |   |  |                      |                       | 24 Dokumen   | 24   | 100,00%                                      |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 02 |      | Mutasi dan Promosi ASN  | Jumlah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN yang Terlaksana   | 3 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 110 Dokumen                                |   |  |                      |                       | 120 Dokumen  | 120  | 109,09%                                      |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                              | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 325 Laporan                                |   |  |                      |                       | 300 Laporan  | 300  | 92,31%                                       |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 350 Dokumen                                |   |  |                      |                       | 200 Dokumen  | 200  | 57,14%                                       |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                   | Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN yang Terlaksana  | 6 Kegiatan                                 |   |  |                      |                       |  |  |  |

| KODE |    |    |   |    |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                       | Target capaian kinerja RPD Tahun 2024-2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (Tahun n-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan OPD Tahun 2023 (Tahun lalu/n-2) |                      |                       | Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun (n-1) 2024 | Perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|------|----|----|---|----|------|---|---|--|---|--|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|      |    |    |   |    |      |   |   |  |   | Target 2023 (n-2)  | Realisasi 2023 (n-2) | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)          | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1    |    |    |   |    |      | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7                    | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                             | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya                                     | - Orang                                    |   |  |                      |                       | 200 Orang  | 200  | 0,00%  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                           | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                               | 3 Dokumen                                  |   |  |                      |                       | 5 Dokumen  | 5  | 166,67%                                      |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 03 | 0008 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN           | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional | 0 Orang                                    |   |  |                      |                       | 5 Orang  | 5  | 0,00%  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 04 |      | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                | <b>Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>           | <b>2 Kegiatan</b>                          |   |  |                      |                       |  |  |  |
| 5    | 03 | 02 | 2 | 04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN        | 4 Laporan                                  |   |  |                      |                       | 4 Laporan  | 4  | 100,00%                                      |



## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai lembaga pengelola kepegawaian sebagai berikut:

1. Pelayanan Legalisir Dokumen Kepegawaian;
2. Pelayanan Gaji Berkala;
3. Penerbitan SK Kenaikan Pangkat;
4. Penerbitan Surat Keputusan Pensiun BUP Golongan I/a - IV/a;
5. Penerbitan Karis/Karsu;
6. Penerbitan Karpeg/E-Karpeg;
7. Penerbitan Kartu Taspen;
8. Penerbitan Kartu BPJS Kesehatan;
9. Permohonan Cuti;
10. Penerbitan Surat Tugas Belajar.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disajikan pada tabel 2.2. Termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun berjalan dan satu tahun maju.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Padang Lawas Utara

| NO  | Indikator   |  | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK<br>(PP-<br>6/08) | Target Renstra SKPD |               |               | Realisasi Capaian |      |      | Proyeksi |      |      | Catatan<br>Analisis |
|-----|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------|------|------|----------|------|------|---------------------|
|     |   |  |                             |                      | 2024                | 2025          | 2026          | 2024              | 2025 | 2026 | 2024     | 2025 | 2026 |                     |
| (1) | (2)   |  | (3)                         |                      | (6)                 | (7)           | (8)           | (11)              | (12) | (13) | (14)     | (15) | (16) | (17)                |
| I   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) |  |                             |                      |                     |               |               |                   |      |      |          |      |      |                     |
|     | 1   | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar                             |                             |                      | 245%                | 250%          | 255%          |                   |      |      |          |      |      |                     |
|     | 2   | Rasio Pegawai Fungsional   |                             |                      | 22,42%              | 23,52%        | 24,65%        |                   |      |      |          |      |      |                     |
|     | 3   | Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi                              |                             |                      | 28,77%              | 33,58%        | 38,75%        |                   |      |      |          |      |      |                     |
|     | 4   | Persentase penetapan pejabat struktural sesuai dengan bidang dan kompetensinya |                             |                      |                     |               |               |                   |      |      |          |      |      |                     |
|     | 5   | Jumlah pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian            |                             |                      | 24<br>Dokumen       | 24<br>Dokumen | 24<br>Dokumen |                   |      |      |          |      |      |                     |

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan Perangkat Daerah Unsur Penunjang Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan "*supporting unit*" bagi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Isu sekaligus permasalahan yang mendesak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan RPD Tahun 2024-2026 adalah *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih guna mendukung pelayanan prima*. Selanjutnya, beberapa isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 antara lain:

- a. Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui sinkronisasi perencanaan dengan realisasi anggaran dan peningkatan capaian target kinerja serta evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan;
- b. Optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian dengan upaya penerapan pelayanan terpadu satu pintu dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Optimalisasi penataan tenaga non-ASN (honorar);
- d. Optimalisasi penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional dan sertifikasi/diklat untuk jabatan struktural, fungsional dan pelaksana;
- e. Peningkatan kualitas informasi dan data kepegawaian serta integrasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah dengan pusat;
- f. Upaya peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja melalui implementasi e-absen dan e-kinerja.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana kerja pembangunan daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPD, memuat rancangan kerangka Renja BKPSDM, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Daerah tersebut merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang wajib disusun. Selanjutnya, bahwa salah satu dokumen perencanaan yaitu dokumen RKPD mempunyai peran yang sangat strategis, karena berperan sebagai penghubung antara kepentingan perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan RKPD.

Berikut tabel review Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan yang dapat dilihat dalam tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.4  
Reviu Terhadap Rancangan Awal  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Padang Lawas Utara

| Rancangan Awal RKP  |             |  |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan  |             |  |                |                         | Catatan Penting |
|---|-------------|--|----------------|-------------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan  | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) |                 |
| 3   | 4           | 5  | 6              | 7                       | 8   | 9           | 10   | 11             | 12                      | 13              |
| UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |             |  |                | 4,997,738,204           | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |             |  |                | 5,503,936,981           |                 |
| KEPEGAWAIAN   |             |  |                | 4,997,738,204           | KEPEGAWAIAN   |             |  |                | 5,503,936,981           |                 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |             | Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                | 4,071,927,659           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           |             | Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                | 4,436,201,081           |                 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                | 32,000,000              | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 10 Laporan     | 36,141,500              |                 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan     | 32,000,000              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan     | 36,141,500              |                 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Kab. Paluta | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                | 2,970,330,259           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Kab. Paluta | Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah   |                | 3,319,169,181           |                 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang       | 2,809,290,259           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 33 Orang       | 3,158,129,181           |                 |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 161,040,000             | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen     | 161,040,000             |                 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                | 377,724,100             | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                | 381,907,100             |                 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Kab. Paluta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3,724,600               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Kab. Paluta | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3,724,600               |                 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Paket       | 98,656,400              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Paket       | 98,656,400              |                 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 800 Paket      | 18,920,000              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 800 Paket      | 18,920,000              |                 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kab. Paluta | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 9 Paket        | 45,413,100              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Kab. Paluta | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 9 Paket        | 45,413,100              |                 |

| Rancangan Awal RKPD  |             |   |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan   |             |   |                |                         | Catatan Penting |
|--|-------------|---|----------------|-------------------------|--|-------------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Lokasi      | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) |                 |
| 3  | 4           | 5   | 6              | 7                       | 8  | 9           | 10  | 11             | 12                      | 13              |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                | 14 Dokumen     | 21,058,000              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                | 30 Dokumen     | 21,058,000              |                 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 115 Laporan    | 189,952,000             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan     | 194,135,000             |                 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Paluta | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                | 514,533,300             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kab. Paluta | Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                | 514,533,300             |                 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1000 Laporan   | 10,000,000              | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1000 Laporan   | 10,000,000              |                 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                      | 12 Laporan     | 290,418,000             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                      | 12 Laporan     | 290,418,000             |                 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 16 Laporan     | 214,115,300             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 16 Laporan     | 214,115,300             |                 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah   | Kab. Paluta |   |                | 177,340,000             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah   | Kab. Paluta |   |                | 184,450,000             |                 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Paluta | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya      | 9 Unit         | 76,790,000              | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Paluta | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya      | 9 Unit         | 83,900,000              |                 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 70 Unit        | 100,550,000             | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 37 Unit        | 100,550,000             |                 |
| <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  |             |   |                | 925,810,545             | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  |             |   |                | 1,067,735,900           |                 |
| Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN   | Kab. Paluta |   |                | 206,450,000             | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN   | Kab. Paluta |   |                | 210,478,000             |                 |
| Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                           | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 10 Dokumen     | 30,000,000              | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                           | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 10 Dokumen     | 29,999,600              |                 |
| Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN   | 2 Laporan      | 30,000,000              | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN   | 2 Laporan      | 29,997,800              |                 |
| Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  | 1 Lembaga      | 30,000,000              | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  | 1 Lembaga      | 34,030,600              |                 |
| Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 24 Dokumen     | 116,450,000             | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 24 Dokumen     | 116,450,000             |                 |



| Rancangan Awal RKPD                                    |             |  |                |                         | Hasil Analisis Kebutuhan                            |             |  |                |                         | Catatan Penting |
|--|-------------|--|----------------|-------------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                         | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan                      | Lokasi      | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.000) |                 |
| 3  | 4           | 5  | 6              | 7                       | 8   | 9           | 10   | 11             | 12                      | 13              |
| <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                          | Kab. Paluta |  |                | 213,280,000             | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                       | Kab. Paluta |  |                | 213,280,000             |                 |
| Pengelolaan Mutasi ASN                                 | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 60 Dokumen     | 53,280,000              | Pengelolaan Mutasi ASN                              | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | 40 Dokumen     | 53,280,000              |                 |
| Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                       | Kab. Paluta | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 300 Laporan    | 80,000,000              | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    | Kab. Paluta | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 300 Laporan    | 80,000,000              |                 |
| Pengelolaan Promosi ASN                                | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 70 Dokumen     | 80,000,000              | Pengelolaan Promosi ASN                             | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 70 Dokumen     | 80,000,000              |                 |
| <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                     | Kab. Paluta |  |                | 362,080,545             | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                  | Kab. Paluta |  |                | 499,999,900             |                 |
| Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                    | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | 4 Orang        | 324,960,000             | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan  | 3 Orang        | 274,000,000             |                 |
| Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN    | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional  | 4 Orang        | 37,120,545              | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional  | 265 Orang      | 225,999,900             |                 |
| <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>         | Kab. Paluta |  |                | 144,000,000             | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>      | Kab. Paluta |  |                | 143,978,000             |                 |
| Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 42 Laporan     | 90,000,000              |   |             |  |                |                         |                 |
|  |             |  |                |                         | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Kab. Paluta | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 42 Dokumen     | 89,978,800              |                 |
| Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai         | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  | 10 Orang       | 24,000,000              | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai      | Kab. Paluta | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  | 10 Orang       | 23,999,600              |                 |
| Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN      | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 5 Laporan      | 30,000,000              | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | Kab. Paluta | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 5 Laporan      | 29,999,600              |                 |

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menghimpun seluruh usulan dan masukan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menyangkut kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur. Terhadap program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dilakukan analisis untuk kesesuaian dengan isu-isu penting dan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar pencapaian target kinerja jangka pendek dan menengah pembangunan daerah dapat terealisasi.

Analisis lebih lanjut atas usulan dimaksud, dilakukan penyesuaian dengan kebijakan tingkat nasional dan provinsi yang menjadi fokus bagi daerah guna memperoleh tingkat prioritas kegiatan yang hendak diusulkan akan dilaksanakan pada Rencana Kerja tahun berjalan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara belum dapat menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, mengingat sasaran dari program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Pegawai Negeri Sipil.

Namun sebagai Perangkat Daerah *supporting system*, program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan berdampak langsung pada masyarakat. Sebagai contoh untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantara indikator utamanya adalah pendidikan dan kesehatan. Melalui kegiatan peningkatan Pendidikan lanjutan ASN dan sertifikasi jabatan bagi tenaga kesehatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berikut tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara terhadap Renja RKPD Tahun 2025 yang dapat dilihat dalam tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025  
Kabupaten Padang Lawas Utara

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN/VOLUME | CATATAN |
|----|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| 1  | 2                | 3      | 4                 | 5              | 6       |
|    | NIHIL            |        |                   |                |         |

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain:

- ***Manajemen Aparatur Sipil Negara.*** Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya, turunan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- ***Sistem Rekrutmen CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),*** Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pasal 99 mensyaratkan seluruh aparatur pemerintah yang berstatus non ASN akan dihapuskan atau dialihkan menjadi PPPK paling lambat per Desember 2024. Tentu kebijakan ini menimbulkan banyak nya polemik dan kontra khususnya dari pemerintah daerah yang sebagian besar sumber daya aparturnya masih berstatus honorer, termasuk Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, ada sekitar 3.800-an ASN dan sekitar 3.200-an tenaga honorer yang terdata, kalua kebijakan ini diterapkan tentunya akan banyak ketimpangan dan kesenjangan terhadap kinerja perangkat daerah dan secara langsung juga akan berdampak pada perputaraan ekonomi dan menimbulkan pengangguran massal. Melihat dampak negative yang begitu besar, akhirnya Pemerintah Pusat menunda penerapan kebijakan tersebut sampai batas yang tidak ditentukan. Sebagai solusinya, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan rekrutmen PPPK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ***Sistem Merit dan NSPK Manajemen ASN serta Profesionalitas ASN***, Peraturan turunannya PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 mensyaratkan agar manajemen ASN dilaksanakan berbasis sistem merit dimana pengawasan dan pengendaliannya menjadi kewenangan KASN, sistem merit ini terbagi atas 8 (delapan) aspek dalam manajemen ASN. Selanjutnya Badan Kepegawaian Negara juga memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam PerBKN No. 12 Tahun 2022 serta adanya usaha peningkatan profesionalitas ASN melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang juga menjadi kewenangan BKN sebagaimana diatur dalam PermenPANRB No. 38 Tahun 2018 dan PerBKN No. 8 Tahun 2019. Ketiga isu manajemen ASN di atas tentu menjadi prioritas juga dalam manajemen dan pengembangan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi BKPSDM, juga yang menjadikan isu ini penting adalah dilakukan evaluasi setiap tahunnya oleh instansi yang berwenang atas pelaksanaannya.
- ***Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan dan pelatihan***, Ketentuan peraturan perundang-undangan mensyaratkan pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun bagi setiap ASN. Lemabag Administrasi Negara (LAN) selaku instansi yang berwenang dalam pengembangan Pendidikan dan Pelatihan ASN menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagai berikut:
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
  - Keputusan Kepala LAN Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pengembangan kompetensi juga mengalami beberapa perubahan misalnya pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan, dengan terbitnya Surat Edaran MenPANRB Nomor 28 Tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021 memungkinkan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ditempuh dengan metode online dan dibolehkan mengambil perkuliahan sabtu-minggu asalkan prodi yang diambil sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Begitunya juga penyelenggaraan Diklat, sudah memungkinkan dengan metode online. Tentunya perubahan-perubahan ini harus direspon dengan cepat dan tanggap.

- **Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi**, seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi tersebut sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen kepegawaian berbasis elektronik tidak bisa dihindari. Badan Kepegawaian Negara selaku pemangku kewenangan dalam pelaksanaan manajemen ASN juga telah banyak mengupayakan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN, sebagai amanah dari UU No. 5 Tahun 2014 yang mensyaratkan manajemen ASN harus dilakukan secara online melalui SI-ASN. SI-ASN ini telah mencakup seluruh aspek dalam manajemen ASN, mulai dari layanan kenaikan pangkat secara online, layanan pengajuan pension secara online, penetapan hukuman disiplin secara online, manajemen kinerja secara online, dll. Untuk itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara juga harus responsif terhadap isu ini.

Tabel 3.1.1  
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

| NO | KEBIJAKAN NASIONAL/PROVINSI   | SUMBER | KETERANGAN |
|----|---|--------|------------|
| A  | NASIONAL  |        |            |
| 1. | Manajemen ASN berbasis sistem merit dan NSPK serta peningkatan IP ASN | APBD   |            |
| 2. | Rekrutmen PPPK  | APBD   |            |
| 3. | Pengembangan Kompetensi   | APBD   |            |
| 4. | Manajemen Kepegawaian berbasis teknologi informasi                    | APBD   |            |
| B  | PROVINSI  |        |            |
|    | -   | -      | -          |



### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 adalah “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur”.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan tujuan akan mengarahkan pada kemudahan dalam perumusan program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan target yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta membantu Bupati Padang Lawas Utara dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, kebijakan yang *up to date*, mampu menjawab tantangan dan isu-isu strategis yang berkembang dalam manajemen ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

**Tujuan** : “Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur”

**Sasaran** : 1. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian dan Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 menetapkan program prioritas Kabupaten Padang Lawas Utara adalah Digitalisasi Pelayanan Publik dan Penguatan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima yang mana salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selanjutnya, sebagai pengungkit tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara berupaya menjabarkannya kedalam Renstra Tahun 2024-2026. Kemudian direalisasikan ke dalam RKPD Perangkat Daerah. Adapun program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

Selanjutnya, sasaran strategik yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen terhadap implementasi atas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
2. Mengoptimalkan manajemen ASN berbasis sistem merit dan implementasi NSPK Manajemen ASN;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam manajemen ASN;
4. Mengoptimalkan pengembangan ASN berbasis analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.

Dengan memperhatikan arah pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merumuskan Renja Tahun 2025. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran dijelaskan dalam tabel 3.3 dibawah ini:

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PADANG LAWAS UTARA  
TAHUN 2025**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |   | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11  | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                |   |  |   |   |  | 5.503.936.981,00    |  |   |  |  |                     | 5.520.738.938,00                     |                     |  |
|    | 5                 | UNSUR PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN  |   |  |   |   |  | 5.503.936.981,00    |  |   |  |  |                     |                                      | 5.520.738.938,00    |  |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN   |   |  |   |   |  | 5.503.936.981,00    |  |   |  |  |                     |                                      | 5.520.738.938,00    |  |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                  | <i>Tercapainya Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan<br/>Daerah Kabupaten/Kota</i>  | -  |   |   | 100 Persen                             | 4.436.201.081,00    |  |   |  |  |                     | -                                    | 4.457.008.938,00    |  |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 10 Laporan                             | 36.141.500,00       |  |   | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | -                                    | 31.302.600,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Capaian<br/>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br/>Kinerja SKPD dan Laporan<br/>Hasil Koordinasi Penyusunan<br/>Laporan Capaian Kinerja dan<br/>Ikhtisar Realisasi Kinerja<br/>SKPD</i> |  |   |   | 10 Laporan                             | 36.141.500,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 31.302.600,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah   | <i>Dokumen Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 120<br>Dokumen                         | 3.319.169.181,00    |  |   | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi  | BKPSDM              | -                                    | 3.351.804.837,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>  |  |   |   | 33<br>Orang/bulan                      | 3.158.129.181,00    | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi  | BKPSDM              |                                      | 3.190.764.837,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |   | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11  | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 9 Paket                                | 45.413.100,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 45.413.100,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 14 Dokumen                             | 21.058.000,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 21.058.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>          |  |   |   | 115 Laporan                            | 194.135.000,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 194.251.101,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Laporan Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                     | -  |   |   | 12 Laporan                             | 514.533.300,00      |  |   | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | -                                    | 514.533.300,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 1000<br>Laporan                        | 10.000.000,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 10.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |   | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11  | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan                    |  |   |   | 12 Laporan                             | 290.418.000,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 290.418.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor yang Disediakan   |  |   |   | 16 Laporan                             | 214.115.300,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 214.115.300,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                     | -  | -  |   |   | -                                      | 184.450.000,00      |  |   | -  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | -                   | -                                    | 177.345.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas<br>Operasional atau Lapangan<br>yang Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak dan<br>Perizinannya |  |   |   | 9 Unit                                 | 83.900.000,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | -                   |                                      | 76.790.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang Dipelihara  |  |   |   | 37 Unit                                | 100.550.000,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | -                   |                                      | 100.555.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM<br>KEPEGAWAIAN DAERAH   | -  | -  |   |   | -                                      | 1.067.735.900,00    |  |   |  |  |                     | -                                    | 1.063.730.000,00    |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | -   | -  |   |   | -                                      | 210.478.000,00      |  |                                      | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | -                   | -                                    | 206.450.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 250 Dokumen                                  |   |   | 10 Dokumen                             | 29.999.600,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | -                   | 250 Dokumen                          | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN   | 7 Laporan                                    |   |   | 2 Laporan                              | 29.997.800,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | -                   | 7 Laporan                            | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  | 1 Lembaga                                    |   |   | 1 Lembaga                              | 34.030.600,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | -                   | 1 Lembaga                            | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 40 Dokumen                                   |   |   | 24 Dokumen                             | 116.450.000,00      | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | -                   | 40 Dokumen                           | 116.450.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN  | <i>Jumlah kegiatan mutasi dan promosi ASN yang terlaksana</i>   | -  |   |   | 3 Kegiatan                             | 213.280.000,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | BKPSDM              | -                                    | 213.280.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN  |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i> | 120 Dokumen                                  |   |   | 40 Dokumen                             | 53.280.000,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | BKPSDM              | 120 Dokumen                          | 53.280.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>  | 950 Dokumen                                  |   |   | 300 Dokumen                            | 80.000.000,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | BKPSDM              | 950 Dokumen                          | 80.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>   | 200 Dokumen                                  |   |   | 70 Dokumen                             | 80.000.000,00       | Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | BKPSDM              | 200 Dokumen                          | 80.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN   | <i>Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang terlaksana</i>  | 4 Dokumen                                    |   |   | 4 Kegiatan                             | 499.999.900,00      |  |                                      | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | BKPSDM              | 4 Dokumen                            | 500.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |   | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11  | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang<br/>Mendapatkan Pendidikan<br/>Lanjutan</i>                                   | 15 Orang                                     |   |   | 3 Orang                                | 274.000.000,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | 15 Orang                             | 274.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0008 | Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional   |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang<br/>Mendapatkan Layanan Diklat<br/>dan Sertifikasi Jabatan<br/>Fungsional</i> |  |   |   | 265 Orang                              | 225.999.900,00      | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -  | Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi  | BKPSDM              |                                      | 226.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi<br>Kinerja Aparatur                          | <i>Jumlah laporan penilaian dan<br/>evaluasi kinerja aparatur</i>                                | -  |   |   | 42 Laporan                             | 143.978.000,00      |  |   | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | -                                    | 144.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                 |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pelaksanaan Penilaian dan<br/>Evaluasi Kinerja Aparatur</i>          |  |   |   | 42 Dokumen                             | 89.978.800,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              |                                      | 90.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                      |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang Diberikan<br/>Penghargaan</i>   | 5 Orang                                      |   |   | 10 Orang                               | 23.999.600,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -  | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | 5 Orang                              | 24.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                   |  |  |   |   |  |                     |  |   |  |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengelolaan Penyelesaian<br/>Pelanggaran Disiplin ASN</i>            | 3 Laporan                                    |   |   | 5 Laporan                              | 29.999.600,00       | Kab. Padang<br>Lawas Utara,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Meningkatk<br>an Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Yang<br>Berkualitas<br>Dan<br>Berdaya<br>Saing | Peningkata<br>n Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>Pelaksanaa<br>n<br>Reformasi<br>Birokrasi | BKPSDM              | 3 Laporan                            | 30.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | J U M L A H       |   |  |  |   |   |  | 5.503.936.981,00    |  |   |  |  |                     |                                      | 5.520.738.938,00    |  |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) 2024 – 2026. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 4.436.201.081,- yang didukung oleh 5 (lima) kegiatan dan 14 (empat belas) sub kegiatan yaitu:
  - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 36.141.500,- dengan sub kegiatan yaitu:
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Rp 36.141.500,-
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 3.319.169.181,- dengan sub kegiatan yaitu:
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 3.158.129.181
    - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Rp 161.040.000,-
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 381.907.100,00,- dengan sub kegiatan yaitu:
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp 3.724.600,-
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp 98.656.400,-
    - Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp 18.920.000,-
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 45.413.100,-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp 21.058.000,-
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 194.135.000,00,-
- 1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 514.533.300,- dengan sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp 10.000.000,-
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp 290.418.000,-
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar Rp 214.115.300,-
- 1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp 184.450.000,- dengan sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp 83.900.000,-
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp 100.550.000,-
2. Program Kepegawaian Daerah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 1.067.735.900,00,- yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan yaitu:
- 2.1. Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, alokasi anggaran sebesar Rp 210.478.000,- dengan sub kegiatan yaitu:
- Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan anggaran sebesar Rp 29.999.600,-
  - Evaluasi pengadaan ASN dan pengadaan ASN dengan anggaran sebesar Rp 29.997.800,-
  - Fasilitas lembaga profesi ASN dengan anggaran sebesar Rp 34.030.600,-
  - Pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp 116.450.000,-

2.2. Mutasi dan Promosi ASN, alokasi anggaran sebesar Rp 213.280.000,- dengan sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan mutasi ASN dengan anggaran sebesar Rp 53.280.000,-
- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,-
- Pengelolaan promosi ASN dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,-

2.3. Pengembangan Kompetensi ASN, alokasi anggaran sebesar Rp 499.999.900,- dengan sub kegiatan yaitu:

- Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan anggaran sebesar Rp 274.000.000,-
- Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional dengan anggaran sebesar Rp 225.999.900,-

2.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, alokasi anggaran sebesar Rp 143.978.000,- dengan sub kegiatan yaitu:

- Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan anggaran sebesar Rp 89.978.800,-
- Pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai dengan anggaran sebesar Rp 23.999.600,-
- Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN dengan anggaran sebesar Rp 29.999.600,-

Jumlah anggaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebesar Rp 5.503.936.981,-.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024. Seluruh elemen pelaksana di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Utara wajib menerapkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas serta partisipasi dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja ini.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Tahun 2025 ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Gunungtua, 19 Juli 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**  
**RESKI BASYAH, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19830923 200212 1 003**